

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada instansi swasta maupun pemerintah pasti memiliki kekayaan atau aset. Aset dalam instansi pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Aset secara umum adalah barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu. Keberadaan aset sangat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya aset tidak dirawat dan dikelola dengan baik akan dapat menghambat kegiatan perusahaan sendiri. Perlu adanya sebuah manajemen aset yang dapat mengelola seluruh aset yang dimiliki. (Hidayat 2011).

Di pemerintah daerah juga memiliki aset yaitu Barang Milik Daerah (BMD). Barang milik daerah di klasifikasikan berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Golongan barang milik daerah meliputi: barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, tanaman, barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan golongan-golongan lain. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Salah satu golongan barang milik negara adalah aset tetap.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan mempunyai nilai yang cukup material. Aset tetap (selain tanah secara fisik) memiliki masa manfaat yang terbatas yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan atau kontribusi aset tetap tersebut terhadap operasional perusahaan.

Aset tetap terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Aset Tetap Berwujud (*Tangible Assets*) adalah aset yang terlihat dengan mata dan memiliki umur ekonomis dan penyusutan seperti: lahan, gedung, mesin, dan peralatan,
2. Aset Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*) adalah aset yang tidak terlihat tetapi memiliki ekonomis seperti: hak guna bangunan, *goodwill*, *patents*, *copyright*, hak cipta, franchise, dan lain-lain.

Aset tetap memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset lancar, jika aset lancar dikendalikan pada aset konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap yang tidak bisa tidak harus dilakukan karena berupa biaya komitmen (*commits cost*), yang dalam masa pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan manajemen melalui wewenang yang dimilikinya.

Manfaat yang diberikan aset tetap ini sangat besar dalam perusahaan baik di tinjau dari segi fungsi, manfaat, jumlah dana yang di investasikan, pengelolaan yang melibatkan banyak orang dan pembuatannya yang sering dalam jangka panjang, maupun dari segi pengawasan yang sangat rumit. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintah karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintah itu sendiri.

Di pemerintahan daerah terdiri dari berbagai banyak dinas salah satu nya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki aset yang begitu banyak baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya. Dengan begitu banyaknya aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pastinya mengalami kesulitan dalam mengelola aset nya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang” Pengelolaan Aset Tetap Berwujud Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang” sebagai judul dalam tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Berwujud Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam Tugas Akhir ini yaitu untuk mempelajari bagaimana pengelolaan aset tetap berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penyusunan Tugas Akhir ini, penulis berharap akan ada manfaat yang diambil oleh berbagai pihak sebagai berikut

1. Bagi Penulis
 - a) Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Universitas Andalas.
 - b) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis bagaimana pengelolaan aset tetap berwujud.



- c) Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja dan menerapkan ilmu-ilmu secara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

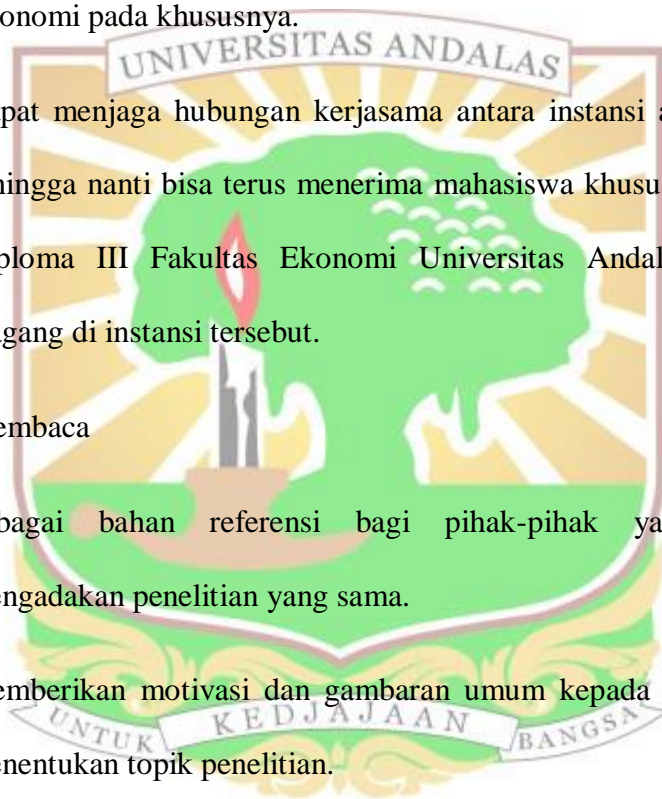
2. Bagi Universitas Andalas

- a) Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Andalas pada umumnya dan Program diploma III Fakultas Ekonomi pada khususnya.

- b) Dapat menjaga hubungan kerjasama antara instansi atau perusahaan sehingga nanti bisa terus menerima mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk terus magang di instansi tersebut.

3. Bagi Pembaca

- a) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama.
- b) Memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.



1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari, mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang sehingga penulis mendapatkan informasi serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui internet dilakukan untuk mendapatkan materi dan bahan-bahan pendukung dengan cara mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang yang terletak di Jl. Sutan Syahrir, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari kerja dimulai pada tanggal 24 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022 yakni hari Senin s/d Kamis pukul (07.30-16.00), jumat pukul (07.30-16.30).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai pengertian aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengeluaran aset tetap, penyusutan aset tetap.

BAB III GAMBARAN UMUM

Membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang yang berisikan tentang sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), visi dan misi, struktur organisasi, tugas atau tanggung jawabnya.

BAB IV PEMBAHASAN,

Memberikan pembahasan tentang hasil kegiatan yang dilakukan selama magang terkait tentang “ Pengelolaan Aset Tetap Berwujud Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

(BPKD) di Kota Padang Panjang”. Uraian tersebut harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan kajian, serta dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun dan berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.

